



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

*Topik: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan
Anggaran Pendidikan*

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Agustus 2018
Waktu : 09.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian
PPN/Bappenas

3. Peserta Rapat :

1. Tenaga Ahli Madya, Deputi II, Kantor Staf Presiden
2. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/ Bappenas
4. *Transparency International* Indonesia (TII)
5. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L.
3. Tujuan dari renaksi ini adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran pendidikan sehingga anggaran 20 persen dapat memiliki dampak yang luas dan akuntabel.
4. Pembagian alokasi anggaran pendidikan 20 persen tidak digunakan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun sebanyak 13 persen digunakan oleh Kementerian Agama, dan masing-

masing 9 persen digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, dan sebagainya.

5. Perkembangan pola pengawasan anggaran pendidikan selama ini melalui Neraca Pendidikan daerah (dikelola oleh Kemdikbud), Dapodik dan aplikasi JAGA yang dikelola oleh KPK. Berdasarkan platform tersebut masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran pada bidang pendidikan. NPD sendiri juga merupakan kumpulan data dari seluruh anggaran pendidikan yang dikelola di daerah.
6. Hingga saat ini belum ada data yang menampilkan alokasi dana pendidikan pada Kemenag. Untuk itu jika berbicara data anggaran pendidikan sebaiknya menghadirkan kementerian lainnya juga.
7. Terkait dengan pengawasan alokasi anggaran pendidikan, TII juga mengembangkan platform *check my school* di beberapa daerah binaan program. Namun, platform ini masih menjawab terkait dengan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
8. Kantor Staf Presiden mendorong pola pengawasan ini lebih bersifat ke dampak alokasi anggaran tersebut, misalnya menggunakan angka buta huruf perempuan. Atau pun menggunakan metode lainnya. Akan tetapi, terkait indikator monitoring yang diusulkan KSP lebih bersifat sangat makro sehingga intervensi nilai-nilai keterbukaan akan kurang relevan.
9. Untuk melibatkan masyarakat pada proses pengawasan ini masih terlalu ambisius, sehingga indikator capaian yang cukup realistis adalah dengan menargetkan peningkatan penggunaan informasi dan akses masyarakat pada NPD. Selanjutnya mulai melangkah pada penguatan kapasitas masyarakat untuk memantau berdasarkan data NPD.
10. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah perlu mendalami isu krusial dan latar belakang usulan renaksi, apakah ingin menyasar pada alokasi pendidikan tertentu (misalnya pendidikan tinggi)? Ataukah seluruh anggaran pendidikan di kementerian lembaga?. Jika ingin melibatkan masyarakat sebaiknya sasaran tidak hanya jumlah like ataupun pengunjung laman situs, karena indikator menjadi kurang ambisius.
11. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk renaksi OGI.

Notula Rapat

Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan Partisipatif

Latar Belakang :

Fungsi kontrol anggaran sekolah saat ini belum efektif karena pola monitoring dan pengawasan hanya bertumpu pada pengawasan internal, sedangkan pengawasan masyarakat masih sangat minim. Untuk mendorong partisipasi dan pemanfaatan NPD, maka perlu dilakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat dengan harapan agar permasalahan pendidikan di daerah dapat terselesaikan.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	1. Sosialisasi halaman NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah 2. Terselenggaranya kegiatan/forum konsultasi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat 3. Tersedianya perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis data NPD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ombudsman RI